

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Institusional

Dalam hubungan dengan kualitas informasi laporan keuangan, pemerintah yang memiliki dampak pengaruh dalam pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Teori koersif dalam teori institusional adalah tekanan eksternal yang diberikan oleh pemerintah, terkait informasi laporan keuangan, peraturan atau lembaga lain untuk mengadopsi struktur dan sistem maka peraturan dapat menyebabkan adanya pengaruh kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Teori Institusional menyatakan bahwa organisasi merespon tekanan-tekanan dari konteks institusional mereka. Scott (2008) menjelaskan bahwa teori institusional dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik. Respon yang dihasilkan dapat berupa adopsi praktek-praktek serta struktur yang dapat diterima secara sosial yang dapat dijadikan sebuah pilihan oleh organisasi yang tepat dalam rangka memperoleh legitimasi dari konteks institusional mereka. Adopsi praktekpraktek atau struktur dalam rangka memperoleh legitimasi tersebut dapat terjadi dalam organisasi melalui 3 mekanisme (disebut sebagai isomorphism) yaitu :

- (i) *coercive* (melalui tekanan dari organisasi lain yang mempunyai dampak pengaruh yang kuat sehingga organisasi yang merespon mempunyai dampak ketergantungan yang besar)
- (ii) *mimetic* (melalui peniruan terhadap organisasi lain yang telah sukses melakukan adopsi dan memperoleh legitimasi); dan
- (iii) *normative* (melalui peran dari suatu kelompok profesional yang memperjuangkan praktek adopsi yang seharusnya dilakukan).

2.1.1 Laporan Keuangan

Definisi laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui

“Standar Akuntansi Keuangan” (2012 : 1) dinyatakan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan paragraf 7 adalah sebagai berikut : “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan. Laporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan atau laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”

2.1.1.1 Tujuan Laporan Keuangan

Mahmudi (2011) menyatakan tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya manusia. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercayakan.

2.1.1.2 Kualitas Laporan Keuangan

Kriteria dan unsur- unsur kualitas atau nilai informasi dari laporan keuangan pemerintah telah ditentukan Standar Akuntansi Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ada empat macam karakteristik kualitas informasi keuangan yaitu :

a. Relevan,

Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut memiliki manfaat dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan manajerial. Informasi yang relevan dapat digunakan untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang dan masa depan (*predictive value*), dan memperbaiki harapan yang telah dibuat sebelumnya (*feedback value*), serta informasi harus tersedia tepat waktu bagi pengguna informasi untuk pengambilan keputusan (*timeliness*)

b. *Reliable / Andal*

Keandalan informasi bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan informasi akan berbadan tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal apabila:

c. Dapat diverifikasi (*verifiable*)

Suatu informasi diuji kebenarannya oleh orang yang berbeda dengan metode yang sama akan menghasilkan hasil akhir yang sama.

d. Netral

Tidak ada unsur bias dalam penyajian laporan atau informasi keuangan.

e. Penyajian secara wajar (*representation faithfulness*)

Menggaambarkan keadaan secara wajar dan lengkap, menunjukkan hubungan antara data akuntansi dan peristiwa-peristiwa yang sebenarnya digambarkan oleh data tersebut.

f. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dilakukan apabila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan secara eksternal dilakukan apabila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

g. Dapat dipahami.

Informasi dikatakan bermanfaat apabila dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas penggunaan. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Informasi yang memiliki kualitas andal, jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi laporan keuangan adalah Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Standar Akuntansi Pemerintah.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Kinerja sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau Individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Winidyaningrum 2009). Kapasitas sumberdaya manusia harus dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Sukmaningrum 2012).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber daya yang kompeten. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Kompetensi merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untk melaksanakan pekerjaan (Harvesi 2005) . Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan pengalaman dibidang keuangan. Hutapea (2008) menyatakan bahwa ada tiga kompnen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan, kemampuan, dan perilaku individu yang dimiliki oleh masing-masing individu.

1. Pengetahuan

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pegawai turut menentukan berhasil

atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang memiliki tingkat pengetahuan yang cukup dapat meningkatkan efisiensi perusahaan

2. Ketrampilan

Ketrampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seorang pegawai dengan baik dan maksimal, misalnya ketrampilan dalam memahami dan memotivasi orang lain baik secara individu maupun kelompok.

3. Sikap

Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan organisasi.

Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif dan ekonomis. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia tersebut maka pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien. Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan (Mardiasmo 2005).

2.1.2.2 Pengendalian Internal

Menurut Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Di dalam (Sukmaningrum 2012) Sistem Pengendalian Internal merupakan pengendalian kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan sistem informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Kegiatan pengendalian atas pengelolaan informasi meliputi : Pengendalian umum, meliputi pengamanan sistem informasi, pengendalian atas akses, pengendalian atas pengembangan dan perubahan perangkat lunak aplikasi, pengendalian atas perangkat lunak sistem, pemisahan tugas, dan kontinuitas pelayanan. Pengendalian

aplikasi, meliputi pengendalian otorisasi, pengendalian kelengkapan, pengendalian akurasi, dan pengendalian terhadap keandalan pemrosesan data dan file data. Menurut Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya:

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
2. Keandalan Laporan Keuangan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Unsur-unsur SPIP menurut peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengacu pada unsur SPI yang telah dipraktikkan pada lingkungan pemerintahan diberbagai negara yang meliputi.

1. Lingkungan Pengendalian
2. Lingkungan pengendalian menggambarkan keseluruhansikap organisasi yang memengaruhi kesadaran dan tindakan personel

Organisasi mengenai pengendalian. Lingkungan menurut peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 pengendalian meliputi :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang baik

2.1.2.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan

keuangan.

Sesuai undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara pada BAB VII mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD pasal 32 ayat 1 dan 2 sebagai berikut :asal 32

Bentuk dan Isi laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dalam Pasal 30 dan 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disingkat SAP. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah.

Standar akuntansi pemerintahan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 memuat 11 (sebelas) Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah, yaitu :

Pernyataan standar ini memiliki tujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan dengan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Indriasari dan Nahartyo (2008)	Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi	Hasil penelitiannya menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan	Penelitian terdahulu menggunakan variabel pemanfaatan teknologi

		Informasi, Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerinyah Daerah	keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan.	informasi sedangkan peneliti tidak menggunakan dan perbedaan Objek
2	Nugraheni dan Subaweh (2008)	pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian menunjukkan standar akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini menggunakan variabel bebas yang berbeda Serta perbedaan objek penelitian
3	Winidyaningrum (2009)	pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu an pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatan waktu an. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keterandalan laporan dan ketepatan waktu an.	Penelitian terdahulu menggunakan ketepatan waktu an. Pemanfaatan teknologi dan penelitian peneliti tidak menggunakan variabel tersebut serta perbedaan objek.
4	Sukmaningrum (2012)	pengaruh kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern terhadap kualitas	Hasil penelitian menunjukkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif.	Perbedaan dalam variabel bebas dan objek penelitian

		laporan keuangan		
5	Mahaputra dan Putra (2014)	pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi pelaporan keuangan.	Perbedaan dalam variabel bebas dan objek penelitian
6	Desianawati, Herawati, dan Sinarwati (2014)	pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, penerapan SAP, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.	Perbedaan dalam variabel bebas dan objek penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau Individu, suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi- fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

(Winidyaningrum, 2009). Kapasitas sumberdaya manusia harus dilihat dari kemampuan untuk menghasilkan keluaran (output) dan hasil (outcome). Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, maka dari itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya mencapai tujuan organisasi (Sukmaningrum, 2012).

Kompetensi Sumber Daya Manusia merupakan kemampuan yang dimiliki seorang karyawan yang berkaitan dengan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan kinerjanya sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Jika kompetensi sumber daya manusia dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien dan efektif. Mahaputra dan Putra (2014)

Mahaputra dan Putra (2014) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Bukti penelitian ini didukung hasil penelitian (Desianawati, Herawati, dan Sinarwati, 2014) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Hasil ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Indriasari dan Nahartyo, 2008) kapasitas sumber daya manusia tidak mempengaruhi nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan dan penelitian dari (Sukmaningrum, 2012) kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian (Winidyaningrum 2009) Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Berdasarkan uraian di atas diturunkan hipotesis ke 1 sebagai berikut :

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui unsur-unsur sistem pengendalian intern ini dengan melakukan langkah- langkah seperti penguatan pengawasan, pemisahan tupoksi yang jelas, pendelegasian wewenang, dokumentasi atas transaksi yang lengkap dan sah, pencatatan yang akurat dan tepat waktu serta melakukan pengujian sistem pengendalian intern yang sudah ada. Untuk mencapai kualitas laporan keuangan yang baik, unsur-unsur tersebut harus berjalan baik. Dengan demikian, sistem pengendalian intern merupakan fondasi *good governance* dan garis pertama pertahanan dalam melawan ketidakbasahan data dan informasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Mahaputra dan Putra (2014)

Hasil penelitian (Indriasari dan Nahartyo, 2008) membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap nilai laporan keuangan pemerintah daerah yang dinyatakan dengan ketepatanwaktuan dan keterandalan. Penelitian ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sukmaningrum, 2012) dan (Mahaputra dan Putra, 2014) yang menyatakan bahwa sitem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas diturunkan hipotesis ke 2 sebagai berikut :

H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.3 Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Daerah terhadap kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Standar Akuntansi Pemerintahan di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Standar

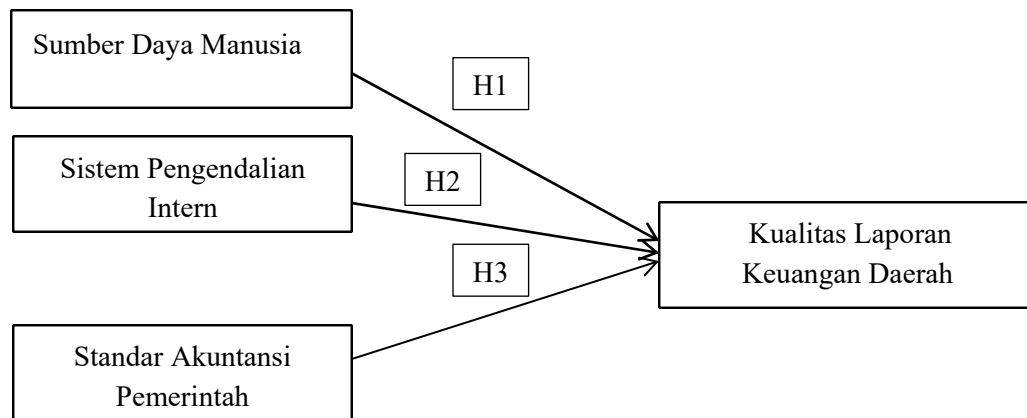
akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang disingkat SAP. SAP diterapkan dalam lingkup pemerintahan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah. Mardiasmo (2002) mendefinisikan standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan acuan dalam dalam menyusun laporan keuangan. Sehingga standar akuntansi keuangan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Apabila standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dengan benar. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kualitas laporan keuangan daerah yang baik akan berdampak pula pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Nugraheni dan Subaweh (2008)

Nugraheni dan Subaweh (2008) dari hasil penelitiannya membuktikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh secara signifikan pada kualitas laporan keuangan. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mahaputra dan Putra 2014) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas diturunkan hipotesis ke 3 sebagai berikut :

H3: Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran